

TEOLOGI INKLUSIF SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AGAMA DI ERA DIGITAL**Pandu Hyangsewu**

Universitas Pendidikan Indonesia

hyangsewu@upi.edu

Qolbi Mujahidillah Adzimat

Universitas Pendidikan Indonesia

Qolbi.sukmayadi@upi.edu

Sansa Bunga Agista

Universitas Pendidikan Indonesia

sansabungaa@upi.edu

Sarah Annisa F

Universitas Pendidikan Indonesia

sarahannisa@upi.edu

Widia Lestari

Universitas Pendidikan Indonesia

widialest@upi.edu

Abstrak

Agama sebagai sebuah hal sakral dalam kehidupan seringkali dianggap memiliki dua sisi, yaitu sebagai pedoman hidup seseorang dan sebagai senjata untuk berkonflik dengan umat yang memiliki kepercayaan agama berbeda. Sejumlah konflik antar umat beragama bukanlah sebuah polemik baru, bahkan saat ini sudah merambah ke lingkup media sosial. Konflik antar umat beragama yang sering disertai dengan aksi kekerasan membuat agama seringkali identik dengan perilaku sangar, garang dan beringas, padahal, seluruh agama mengajarkan kebaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi sejumlah artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya penyebab konflik agama, yaitu (1) politisasi dan kepentingan budaya; (2) egoisme dan eksklusivisme beragama. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menawarkan sebuah model Teologi Inklusif sebagai resolusi terhadap konflik agama dengan aspek yang menyertainya berupa (1) moderasi beragama; (2) pluralisme; (3) inklusivisme beragama.

Kata kunci: *Konflik Agama; Resolusi Konflik; Teologi Inklusif.***Abstract**

Religion as a sacred thing in life is often considered to have two sides, namely as a guide for one's life and as a weapon for conflict with people who have different religious beliefs. A number of conflicts between religious communities are not a new polemic, even now they have penetrated the scope of social media. Conflicts between religious communities that are often accompanied by acts of violence make religion often synonymous with violent, fierce and violent behavior, whereas all religions teach

goodness. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques in this study were using interviews and documentation of a number of scientific articles. The results of this study are the identification of the causes of religious conflicts, namely (1) politicization and cultural interests; (2) egoism and religious exclusivism. Departing from these problems, the researcher offers a model of Inclusive Theology as a resolution to religious conflicts with the accompanying aspects in the form of (1) religious moderation; (2) pluralism; (3) religious inclusivism.

Keywords: Religious Conflict; Conflict Resolution; Inclusive Theology

Pendahuluan

Konflik antar umat beragama bukanlah hal baru yang terjadi, melainkan sudah berlangsung sejak lama bahkan usianya hampir menyamai umat beragama itu sendiri. Konflik antar umat beragama tersebut tidak terspesifikasi disebabkan oleh ajaran dan syariat keagamaannya, namun maraknya bentuk penyalahgunaan agama yang kemudian memecah belah masyarakat akibat tingginya tingkat sensitivitas dan eksklusivitas (Margawati, 2000). Memegang peranan yang sakral dan fundamental dalam kehidupan sosial bermasyarakat menjadikan agama sering diposisikan secara ambigu, yaitu di satu sisi dijadikan landasan religius, dan di sisi lainnya dijadikan senjata perpecahan untuk menyerang satu sama lain.

Sejumlah rekam sejarah mencatat konflik antar umat beragama didominasi oleh unsur kekerasan, misalnya konflik Buddha Rohingya yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2019 yang diwarnai banyak aksi kekerasan seperti penghancuran, pengusiran, pemerkosaan hingga pemenggalan dengan jumlah korban jiwa melebihi 6.000 orang dan 730 diantaranya adalah anak-anak (BBC News Indonesia), konflik lainnya adalah konflik Israel dengan Palestina yang menewaskan sekitar 3.500 warga sipil yang dihitung sejak tahun 2009 (cnnindonesia.com).

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang plural dan damai, nyatanya tidak terhindarkan dari konflik antar umat beragama seperti yang terjadi dalam lingkup internasional, justru, tingginya tingkat pluralitas di Indonesia seringkali menjadikan isu agama sebagai isu yang sering dilanda polemik hingga berujung konflik. Salah satu konflik antar umat beragama yang populer di Indonesia adalah konflik Poso di mana konflik tersebut melibatkan umat Muslim dengan umat Kristiani di Sulawesi Tengah, konflik yang terjadi sejak tahun 1998 hingga 2001 itu berbuntut panjang dan tercatat telah menewaskan 200 korban jiwa yang berasal dari kedua pihak terkait (cnnindonesia.com). Konflik antar umat bergama lainnya yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa perusakan sejumlah vihara dan kelenteng di Sumatera Utara yang masih berupa buntut panjang dari permintaan salah seorang warga untuk mengecilkan volume pengeras suara di masjid setempat karena dianggap bising dan mengganggu, permintaan tersebut dianggap sebagai penyulut api kerusuhan (BBC News Indonesia).

Masih terjadi di Indonesia, konflik selanjutnya yang cukup populer adalah peristiwa Aceh Singkil yang dilatarbelakangi oleh pembakaran gereja yang dianggap tak memiliki izin mendirikan bangunan, empat tahun berselang, pengurus gereja melayangkan keluhan karena merasa kewalahan dalam mengurus birokrasi perizinan mendirikan bangunan yang dinilai menyulitkan kelompok Non Muslim karena provinsi tersebut didominasi masyarakat beragama Islam (BBC News Indonesia). Konflik agama tersebut apabila terus dibiarkan akan berpotensi mengancam kedamaian dan kebebasan berinteraksi sosial, terlebih dengan dominasi aksi kekerasan membuat kemungkinan bahwa ajaran agama dianggap sebagai doktrin yang sangar, beringas dan jauh dari kedamaian.

Dominasi aksi kekerasan yang hampir menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik antar umat beragama mengakibatkan perilaku eksklusivisme atau sikap menutup diri yang ekstrem pada masyarakat agama, termasuk kelompok dominan (Ulfa, 2013). Kecenderungan sikap menutup diri ini bukan tidak mungkin membuat individu tidak bisa menerima substansi ajaran agama yang pada hakikatnya mengajarkan kedamaian.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya eksistensi teknologi informasi dan komunikasi, dewasa ini, kemudahan akses internet telah hampir menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial sebagai *platform* interaksi satu sama lain dengan cakupan tak terbatas pun menjadi sasaran baru untuk memasukkan konten keagamaan yang lagi-lagi menimbulkan ambiguitas. Peranan media sosial dalam menyajikan konten keagamaan, di satu sisi berperan sebagai media edukasi religi, namun di sisi lain menjadi pemicu konflik agama (Jarir, 2019). Misalkan, kasus 2 orang warga sipil di Selangor, Malaysia yang menggunakan media sosial Facebook untuk menghina Nabi Muhammad SAW dan menghina kesucian agama Islam dengan tujuan menyakiti hati umat Islam (Ramly dkk., 2020). Jangkauan media sosial yang luas disebut-sebut menjadi sasaran empuk untuk menyebarkan kebencian di masyarakat dengan menggunakan agama sebagai senjata pemecah belah.

Terdapat beberapa penelitian serupa mengenai kajian yang diteliti oleh peneliti, diantaranya artikel dengan judul “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan” yang ditulis oleh Zainal Abidin, di mana fokus penelitiannya mengungkap bagaimana sikap masyarakat muslim Indonesia yang melupakan teologi inklusifnya dalam konteks perilaku sehari-hari. Adapula artikel mengenai “Teologi Inklusif untuk Membangun Kerukunan (Analisis Teks Tutar Jatiswara)” yang ditulis oleh I Komang Suastika Arimbawa dan Putu Ayu Septiari, di mana fokus penelitiannya membahas bagaimana membangun paradigma berpikir inklusif di masyarakat, metode yang digunakannya pun dengan menggunakan analisis teks tutur. Selainnya, adapula artikel dengan judul “Teologi Inklusif Nurcholish

Madjid dan Relevansinya dengan Pluralitas Agama di Indonesia” yang ditulis oleh Abdul Hakim, di mana fokus penelitiannya memaparkan bagaimana keterhubungan antara teologi inklusif dengan sikap plural dalam kehidupan beragama, metode yang digunakannya pun dengan studi literatur. Berbeda dengan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, pada penelitian ini tim peneliti memahami prinsip “inklusif” dalam beragama, dan menggagas suatu rekonstruksi model teologi inklusif dengan mengumpulkan data-data dari tiga pemikiran besar Islam agar diperoleh data yang objektif dan model yang dibuat ini dibuat untuk meredam konflik agama di era digital. Pada penelitian ini, model yang telah digagas pula akan diujikan terlebih dahulu terkait penerimaannya di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dibahas mengingat konflik atas nama agama kian merebak di masyarakat, khususnya dalam dunia digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana peneliti hendak menggali dan memahami makna individu atau kelompok terhadap suatu masalah yang sedang terjadi. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan persiapan, merancang instrumen penelitian untuk wawancara, melakukan proses wawancara, di mana wawancara dilakukan kepada 3 tokoh agama dan tokoh akademisi yang memiliki latar belakang pemikiran agama yang berbeda, hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data secara utuh, mampu memahami realitas masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga peneliti mampu membuat suatu model teologi inklusif yang objektif. Wawancara berturut-turut dilakukan pada tanggal 01 November, 03 November dan 06 November 2021. Setelah melakukan proses wawancara, peneliti menginterpretasi dan menganalisis data yang sudah didapatkan, untuk dijadikan suatu kesimpulan model teologi yang dijadikan sebagai resolusi konflik agama di era digital.

Kajian Teori

Konflik Sosial

Teori konflik yang lahir sampai saat ini adalah karya-karya besar yang dilahirkan para ahli, Teori konflik ini adalah merupakan bagian dari Teori Sosiologi Modern yakni para penganut Teori Sosiologis Naturalis. Perlu diketahui bahwa para pencetus dahulu yakni para penganut Aliran Naturalis sering terikat pada ide yang memandang sosiologi sebagai suatu ilmu seperti halnya dengan ilmu-ilmu Alam (Khalidun *et al.*, 2017) dalam teori konflik yang diutarakan George Simmel, Ia mendefinisikan Konflik sebagai sesuatu yang alamiah. Dalam hubungan superordinat dan subordinat dimungkinkan terjadinya konflik bahkan dalam hubungan sosial yang erat sekalipun, konflik dan ketegangan sangat memungkinkan untuk terjadi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik sebagai salah satu bentuk dasar interaksi, Simmel juga menyatakan bahwa konflik bisa terjadi ketika individu menjalani proses sosialisasi, hal ini berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Ketika sosialisasi berlangsung terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang mewujudkan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi itulah yang kemudian menjadi sebab-sebab timbulnya sebuah konflik. (Simmel *et al.*, 2017)

Konflik yang timbul ini bisa berdampak negatif yaitu terjadinya disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok atau antar kelompok tersebut ketika tidak mencapai suatu konsensus terhadap perbedaan yang menghasilkan sikap antagonistik dampak yang dihasilkan dari konflik yang terjadi ini pun bisa sangat parah dan bersifat memecah.

Resolusi Konflik

Morton mengartikan resolusi konflik sebagai sebuah pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama-sama (*solve a problem together*) (Adiansah, 2013) resolusi konflik juga dalam hal ini dianggap sebagai kumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik yang terjadi tersebut. Pandangan para pemikir Neo-Marxist dan pemikir-pemikir radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat

direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas (Adiansah, 2013) Namun dalam hal ini tentu saja resolusi konflik menjadi upaya yang sudah semestinya dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang baik dan lebih seimbang serta untuk meminimalisir kerusakan yang biasa disebabkan oleh timbulnya konflik dalam kehidupan masyarakat.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama (*Moderasi Beragama*, 2013). Sikap seperti ini bisa menjadi kunci terbangunnya perdamaian dan keselarasan antar umat beragama baik dalam skala lokal, nasional maupun global.

Pluralisme Beragama

Dalam hal ini, Pluralisme dalam beragama diartikan sebagai sebuah sikap penerimaan bahwa kita adalah berbeda-beda dan memiliki kebebasan memeluk agama mana pun. Perspektif sosiologi mengkaji lebih jauh mengenai pluralisme agama yang kemudian diasumsikan bahwa pengakuan merupakan hal paling mendasar dalam konsep pluralisme agama (Hanik, 2014). Implementasi pluralisme agama yang baik memengaruhi interaksi sosial seiring dengan tatanan masyarakat yang hidup rukun satu sama lain.

Inklusivisme Beragama

Inklusivisme beragama merupakan sebuah konsep pemahaman yang menganggap kebenaran tidak lagi menjadi monopoli suatu agama tertentu, melainkan kebenaran itu berhak dimiliki oleh setiap agama manapun di dunia (Sunaryo, 2012). Gagasan mengenai konsep teologi inklusif ini hadir dari dunia Islam. Agama Islam diyakini oleh kaum Muslim sebagai ajaran universal, begitu juga dalam pandangan Nurcholish Madjid (1995), yang menyatakan keuniversalan Islam tersebut didasarkan pada pernyataan Kitab Suci Al-Qur'an bahwa Risalah Muhammad SAW tidak hanya diperuntukkan pada suatu kaum di suatu masa, sebagaimana para nabi/rasul sebelumnya, tetapi berlaku untuk seluruh alam, termasuk seluruh umat manusia dari berbagai ras dan bangsa (Abidin, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Konflik Agama

a. Kepentingan Politik dan Penolakan terhadap Budaya

Kepentingan politik menjadi salah satu penyebab yang memicu konflik di antara umat beragama. Terlepas dari latar belakang, ajaran agama justru tidak memperkenankan adanya kekerasan. Setiap ajaran agama senantiasa membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi para pemeluknya, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kepada para penganutnya untuk merugikan diri sendiri, orang lain, dan makhluk ciptaan Tuhan selainnya, (Fahri & Zainuri, 2019). Tidak ada kekerasan dalam ajaran agama Islam, seperti yang dikatakan Al-Quran bahwa dalam ajaran Islam sendiri terdapat nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang memastikan kekerasan itu tidak ada, karena hal tersebut berada di luar batas keadilan dan kebenaran, (Abdussalam, 2021). Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama lain bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tetapi kepentingan politik menyebabkan keadaan yang disebut sebagai politik identitas, yaitu kondisi di mana agama dijadikan senjata untuk memenangkan konflik politik, (Firdaus, Endis. Wawancara Pribadi. 01 Juli 2021). Agama seringkali dijadikan alat pemecah belah demi sejumlah kepentingan individu dan kelompok yang tengah berkuasa untuk melegitimasi perilaku mereka, (Isnaeni, 2014).

Marsana Windhu menyampaikan bahwa penyebab adanya kekerasan dalam agama diklaim secara mutlak sebagai ajaran dan syariat keagamaannya, tetapi dilihat pula dari aspek dan kondisi sosial-politik, seperti; ketimpangan sosial, kolusi, kelangkaan sumber daya alam, dominasi, dan eksploitasi. Adanya landasan fundamental mengenai teologis kerunukan, itu artinya setiap agama tidak menghendaki adanya kekerasan. Besarnya kecenderungan kalangan umat manusia melakukan perilaku kekerasan hingga menimbulkan konflik antar umat beragama, sejatinya terdapat dalam kehendak manusianya itu sendiri, (Kirchberger, 2018).

Selain kepentingan politik, penyebab lain yang bisa menimbulkan ketegangan di kalangan internal atau eksternal umat beragama adalah penolakan budaya yang ada di Indonesia, dan menganggapnya bertentangan dengan ajaran

yang selama ini diyakininya. Kondisi bersitegang ini kemudian merambah ke media sosial, seperti dalam akun Instagram @_al.anazi_, di mana dalam akun tersebut disebutkan bahwa tradisi-tradisi keislaman, seperti; beduk magrib saat bulan puasa dan acara maulidan bukan berasal dari ajaran dan syariat Islam, sehingga yang melakukannya termasuk ke dalam kefasikan. Unggahan ini menuai pro dan kontra warganet dan saling menyalahkan satu sama lain, padahal budaya dan agama yang ada bisa menjadi suatu hal yang bersifat sinergis.

Dalam konteks ini, Islam dan budaya sangat erat kaitannya, fungsi Islam terhadap budaya ini sebagai suatu pola, turus, atau penyangga yang mengarahkan budaya tersebut agar bisa dilaksanakan beriringan dengan syariat, (Sumarna, Elan. Wawancara Pribadi. 06 Juli 2021). Pada dasarnya, budaya merupakan hasil kreativitas manusia yang diwarisi secara turun temurun. Islam berinteraksi dengan kebudayaan tersebut dengan mengubah sejumlah bagian yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam menjadi suatu hal yang selaras, (Abdussalam, Aam. Wawancara Pribadi. 03 Juli 2021). Tidak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara heterogen yang kental dengan keragaman budayanya, maka menerima, menjunjung tinggi, memelihara keberadaannya—dengan tetap mempertimbangkan keselarasannya dengan ajaran dan syariat Islam—merupakan hal yang sangat dianjurkan, (Muhammad Taufik, 2013).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Islam tidak hanya dipandang sebagai sumber nilai yang mengatur urusan spiritual, tetapi juga tentang syariat, dalam arti sistem tatanan sosial yang mengatur cara hidup dan berperilaku umat beragama, sehingga Islam sebagai sebuah sistem keyakinan menjadi bagian inti dari sistem nilai yang ada, menjadi penggerak dan pengontrol bagi tindakan agar sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran Islam (Muhammad Taufik, 2013). Islam akan senantiasa beradaptasi dengan kebudayaan yang ada, apabila ada bentuk budaya yang secara substansi sesuai dengan ajaran Islam, maka akan diterima. Sedangkan jika bertentangan akan ditolak dan ditinjau ulang, (Luthfi, 2016). Prinsip menerima budaya lokal dengan tetap mempertimbangkan keselarasannya dengan ajaran universal agama—khususnya Islam, sedikit demi sedikit dapat mengikis konflik internal agama yang terjadi di media sosial.

b. Egoisme dan Eksklusivisme Beragama

Indonesia merupakan sebuah bangsa dengan struktur masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama. Kemajemukan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat tersebut menjadi sebuah kekayaan bangsa yang tak ternilai, sekaligus menjadi ancaman disintegrasi bangsa, apabila perbedaan yang ada tidak disikapi dengan baik, (Saumur, 2019). Perbedaan agama merupakan salah satu bentuk pluralitas masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vernon yang mengatakan, “*religious heterogeneity within a nation can also contribute to strain rather than harmony*”, (Vernon, 1962). Kalimat tersebut berarti perbedaan-perbedaan agama dalam sebuah bangsa dapat menjadi harmoni maupun tekanan bagi negara tersebut.

Pada dasarnya semua agama mengajarkan hal-hal baik seperti perdamaian dan persatuan. Namun pada praktik nyata pengamalannya, agama seringkali menampakkan diri sebagai kekuatan yang garang, beringar, penyebar konflik, hingga penyebab peperangan (Natalia, 2016).

Adapun perpecahan masyarakat berlatar belakang konflik agama disebabkan oleh perbedaan doktrin agama serta permasalahan kelompok mayoritas dan minoritas, (Natalia, 2016). Doktrin agama yang egois dan eksklusif, seperti; fanatisme sempit, *truth claim*, dan keengganan memahami serta bersikap terbuka terhadap agama lain menjadi penghambat terbentuknya kerukunan beragama, (Sumbulah, 2015). Tidak rukunnya umat beragama dalam sebuah bangsa dapat memunculkan potensi konflik agama yang dapat bermuara pada disintegrasi bangsa.

Selain itu, konflik agama yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh keadaan mayoritas dan minoritas kelompok agama, sehingga menyebabkan terjadinya kriminalisasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, (Saumur, 2019). Kelompok agama mayoritas menjadi dominan, meskipun secara hukum negara mengakui kesetaraan semua agama. Pengabaian hak kelompok agama minoritas dengan melakukan politisasi, termasuk politisasi wilayah serta kekuatan dan perhatian penguasa menjadi sebuah bentuk eksklusi sosial, (Saumur, 2019). Eksklusi sosial yang dimaksud

merupakan sebuah proses multi-dimensional (dalam hal ini agama) yang membatasi hak-hak kelompok lain dalam partisipasi politik, sumber daya, dan integrasi kebudayaan bangsa, (Bryne, 2005). Hal tersebut merupakan realisasi dari praktik keagamaan yang eksklusif secara berlebihan.

Sikap egoisme dan eksklusivisme merupakan akibat fiksasi beragama yang berlebihan juga terjadi di ruang-ruang publik, (Join dkk., n.d.), yang pada era globalisasi saat ini berupa ruang lingkup media sosial. Sikap tersebut ditunjukkan dengan membentuk gambaran atas perbandingan ajaran agama yang dianut dengan agama lain, yang pada akhirnya memiliki penilaian tersendiri atas keduanya secara subjektif, dengan menjadikan agama yang dianut sebagai patokan penilaian, (Natalia, 2016). Penilaian tersebut pada akhirnya membentuk sebuah keengganan untuk menjaga harmonisasi dalam media sosial, sehingga konflik agama pun terjadi di dalam dunia digital. Penyangkalan terhadap agama lain menjadi masif, (Join dkk., n.d.), terlebih di ruang media sosial. Sikap egois dengan lebih mementingkan kepentingan agama yang dianut lalu kemudian menyangkal kepentingan umat beragama secara menyeluruh terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat atas konsep pluralisme agama, (Saumur, 2019).

2. Teologi Inklusif

Teologi Inklusif merupakan sebuah konsep pemahaman agama yang menganggap kebenaran tidak lagi menjadi monopoli suatu agama tertentu, melainkan kebenaran itu berhak dimiliki oleh setiap agama manapun di dunia. Gagasan mengenai konsep teologi inklusif ini hadir dari dunia Islam. Agama Islam diyakini oleh kaum muslim sebagai ajaran universal. Nurcholis Madjid menyampaikan bahwa keuniversalan Islam tersebut didasarkan pada pernyataan Kitab Suci Al-Quran bahwa risalah Muhammad saw. tidak hanya peruntukkan pada suatu kaum di suatu masa, sebagaimana ajaran nabi dan rasul sebelumnya, akan tetapi berlaku untuk seluruh alam semesta, tanpa memandang ras dan bangsa (Abidin, 2014). Nurcholis Madjid juga mengidentifikasi pesan untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhan secara universal yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa/4 : 131, "*Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi Kitab Suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar bertakwa kepada Allah*". Bertakwa kepada Tuhan tersebut dijadikan indikator oleh Nurcholis Madjid

.lebagai “Kesadaran ke-Tuhanan” yang bersifat monoteistik, yang dapat dimaknai sebagai sikap pasrah, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Tuhan yang tidak lain ajaran dari Islam itu sendiri (Abidin, 2014). Sikap ini pulalah yang dianggap sebagai suatu risalah yang dibawakan sama oleh seluruh Nabi dan Rasul, mulai dari Adam A.S. hingga Muhammad saw. Gagasan Teologi Inklusif Nurcholis Madjid juga menyampaikan bahwa yang membedakan antara umat Islam dan agama selainnya adalah perihal tata cara peribadahan dan syariatnya saja, sedangkan sikap pasrah dan tunduk patuh kepada Tuhan ini yang dijadikan sebagai *common platform* antar berbagai keyakinan dan kepercayaan

Penutup

Setiap ajaran agama tidak memiliki unsur kekerasan karena bentuk kekerasan apapun termasuk menyalahi aspek keadilan dan kebenaran. Tidak adanya ajaran kekerasan dalam agama seharusnya membuat umat beragama dapat hidup rukun tanpa terjadinya konflik yang diakibatkan oleh perbedaan kepercayaan, namun, konflik agama tetap saja terjadi. Konflik yang mengatasnamakan agama tersebut disebabkan oleh penggunaan agama sebagai senjata dalam kepentingan politik yang kemudian disebut sebagai politik identitas. Tidak hanya disebabkan oleh kepentingan politik, konflik agama yang kerap terjadi di tengah masyarakat juga disebabkan oleh banyaknya budaya lokal yang diadopsi dalam ritual keagamaan sehingga dianggap sebagai bagian ajaran agama itu sendiri, misalnya tradisi maulidan dan beduk Maghrib di Bulan Ramadhan. Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk budaya lokal yang diterapkan dalam ritual keagamaan seringkali menuai pro dan kontra masyarakat di media sosial.

Pluralitas masyarakat Indonesia yang diakibatkan banyaknya aspek heterogen salah satunya adalah agama menempatkan pluralitas masyarakat Indonesia dalam dua sisi, yaitu sebagai kekayaan bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa. Terjadinya politik identitas membawa agama kepada citra yang sangar, garang dan agresif sehingga bersifat memicu konflik dan peperangan, meskipun pada hakikatnya setiap agama menyerukan hal baik seperti persatuan dan perdamaian sesama. Penyebab selanjutnya di balik konflik agama adalah adanya doktrin agama dan kelompok agama mayoritas dan minoritas yang kemudian memunculkan sikap egois dan eksklusif seperti fanatisme, *truth claim* dan ketidakmauan untuk menghormati agama lain. Kelompok mayoritas

akan merasa mereka lebih unggul karena berjumlah lebih banyak sehingga enggan menghormati kelompok minoritas, hal ini tetap terjadi sekalipun hukum negara telah mengakui kesetaraan semua agama yang diakui. Lebih jauh, dalam lingkup media sosial, sikap egoisme dan eksklusivisme yang terjadi mengakibatkan fiksasi agama berlebihan sehingga menjadikan agama sebagai sarana pembanding dan patokan dalam berperilaku, jika terus dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan regresi harmonisasi karena satu sama lain enggan untuk menghargai, bahkan dijadikan tameng untuk menyerang satu sama lain. Dalam hal ini, dibutuhkan pemahaman yang lebih baik dan luas mengenai konsep pluralisme agama supaya harmonisasi dapat terwujud di tengah heterogenitas tatanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuna, Q. and Nurdin, S. (2016) 'Fanatisme dalam Tinjauan Psikologi Agama', *Jurnal Suloh*, 1(1), pp. 75–82.
- Bakar, A. (2016) 'ARGUMEN AL-QUR'AN TENTANG EKSLUSIVISME, INKLUSIVISME DAN PLURALISME', pp. 43–60.
- Brannen, J. (2005) 'Mixing methods: The entry of qualitative and quantitative approaches into the research process', *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice*, 8(3), pp. 173–184. doi: 10.1080/13645570500154642.
- Bryne, D. (2005) *Social Exclusion*. 2nd Editio. New York: Open University Press.
- Clark, P. and Clark, P. (2007) 'of Research Questions', pp. 207–211.
- Hanafi, I. (2018) 'Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama', *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), pp. 47–67.
- Jarir, J. (2019) 'Solusi Konflik Agama Di Media Sosial', *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(2), p. 106. doi: 10.24014/trs.v10i2.7080.
- Join, M., Bernad, I. D. and Naja, A. (no date) 'Membongkar egosentrisme, eksklusivisme dan fiksasi agama dalam ruang publik'.
- Margawati, M. (2000) 'Konflik antar Agama atau Politisasi Agama?', *Antropologi Indonesia*, 1, pp. 513–517. Available at: <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/1.4.08.pdf>.
- Natalia, A. (2016) 'Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)', *Al-Adyan; Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), pp. 36–56.
- Ramly, R. M. et al. (2020) 'Tema Penghinaan Agama Islam Di Media Sosial', *E-Proceedings of The International Conference on Aqidah, Religions and Social Sciences (SIGMA 10)*, (November), pp. 242–484.
- Saumur, A. S. (2019) 'Urgensi Pluralisme Dalam Beragama Bagi Masyarakat Indonesia', *Foramadiahi*, pp. 80–120.
- Sumbulah, U. (2015) 'Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang', *Jurnal Analisa*, 22(1), pp. 1–13.
- Suryadi (2017) 'Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme

- Dan Liberalisme Agama)', *Mantiq*, 2, pp. 59–66.
- Ulfa, M. (2013) 'Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid', *Kalimah*, 11(2), p. 238. doi: 10.21111/klm.v11i2.94.
- Vernon, G. M. (1962) *Sociology of Religion*. New York: McGraw Hill Book Coy.
- Yunus, F. M. (2014) 'Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya', *Substantia*, 16(2), pp. 217–228.